ANALISIS STRATEGI IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SDM DI MALUKU

(Analysis of Free Nutritious Meal Program Implementation Strategy in Improving Human Resource Quality in Maluku)

Erfin Amiruddin[1], I Dewa Ketut Kerta Widana[2], Dewi Puspaningtyas Faeni[3]

[1,2,3]Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia
E-mail : erfinamiruddin8@gmail.com[1], dkwidana@unsurya.ac.id[2], dewi.faeni@unsurya.ac.id[3]

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan ambisius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang resmi bergulir sejak 6 Januari 2025, menyasar peningkatan status gizi anak sekolah dan ibu hamil di seluruh pelosok negeri. Maluku, sebagai provinsi kepulauan dengan indeks pembangunan manusia yang masih tertinggal serta angka stunting yang mengkhawatirkan, menjadi salah satu wilayah prioritas sekaligus arena tantangan paling pelik dalam proses implementasinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi implementasi MBG di Provinsi Maluku serta relevansinya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) jangka panjang. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi kepustakaan dan analisis dokumen kebijakan, kajian ini menemukan bahwa hambatan geografis, keterbatasan infrastruktur logistik, serta disparitas kapasitas institusional menjadi faktor determinan keberhasilan program. Strategi adaptif berbasis kearifan lokal dan penguatan koordinasi lintas sektor dinilai paling relevan untuk kondisi Maluku. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa investasi gizi yang terstruktur dan berkelanjutan berkorelasi positif terhadap pembentukan SDM unggul di kawasan timur Indonesia.

Kata Kunci : *Makan Bergizi Gratis, Kualitas SDM, Maluku, Implementasi Kebijakan, Gizi*

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (MBG) represents an ambitious policy of President Prabowo Subianto's administration, officially launched on January 6, 2025, targeting improved nutritional status of school children and pregnant mothers across Indonesia. Maluku, as an archipelagic province with a lagging Human Development Index and alarming stunting rates, stands as both a priority region and the most complex arena for program implementation. This study aims to analyze MBG implementation strategies in Maluku Province and their relevance to long-term human resource quality improvement. Using a descriptive qualitative approach with literature review and policy document analysis techniques, this study finds that geographic barriers, logistical infrastructure limitations, and disparities in institutional capacity are the determining factors of program success or failure. Adaptive strategies based on local wisdom and trengthening cross-sectoral coordination are deemed most relevant for Maluku conditions. The implications affirm that structured and sustainable nutritional investment positively correlates with superior HR formation in eastern Indonesia.

Keywords : *Free Nutritious Meal, HR Quality, Maluku, Policy Implementation, Nutrition*

PENDAHULUAN

Berbicara soal gizi dan pembangunan manusia di Indonesia Timur, jujur saja, rasanya seperti menyentuh luka yang belum tuntas dibalut. Maluku berdiri di persimpangan antara kekayaan alam yang melimpah ruah dan paradoks ketertinggalan yang sudah lama mengakar. Provinsi yang terdiri dari 1.412 pulau ini memiliki karakteristik geografis paling menantang di antara provinsi-provinsi di Indonesia, dengan sebagian besar wilayahnya berupa lautan dan aksesibilitas yang sangat terbatas di daerah-daerah terpencil. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku pada 2023 tercatat sebesar 72,25, masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 74,39 (BPS, 2024). Angka stunting, meski menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, tetap bertengger di kisaran 26,1% pada 2023, jauh melampaui capaian nasional sebesar 21,5% (Kemenkes, 2024). Dua angka ini saja sudah cukup menggambarkan betapa dalamnya problem struktural yang dihadapi Maluku dalam konteks pembangunan SDM.

Di sinilah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai intervensi kebijakan yang ambisius sekaligus menentukan. Diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari 2025, program *flagship* pemerintahan ini menargetkan tidak kurang dari 82,9 juta penerima manfaat secara nasional, mencakup siswa dari jenjang PAUD hingga SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui (Badan Gizi Nasional, 2025). Anggaran yang dialokasikan pada tahun pertama implementasi mencapai Rp71 triliun, menegaskan komitmen fiskal yang serius dari pemerintah. Program ini dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ujung tombak operasional di lapangan.

Mengimplementasikan program sebesar ini di wilayah kepulauan seperti Maluku jauh lebih kompleks dari sekadar urusan distribusi logistik. Ada dimensi tata kelola yang rumit, persoalan kapasitas kelembagaan yang masih lemah, dan variabel kearifan lokal yang bila diabaikan berpotensi membuat rencana brilian di atas kertas runtuh di lapangan. Landasan teori utamanya dari Becker (1964) dimana menitikberatkan investasi kesehatan dan gizi sebagai investasi produktif. Kontribuso 30% sebagai faktor perbaikan status gizi. implementasi Edward III (1980) bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh empat variabel kritis yang saling berinteraksi: komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi. Teori terakhir dengan menenpatkan Nutrition Investment Theory (Hoddinott et al., 2022)

Kajian-kajian terdahulu, masih terbatas yang membahas terkait MBG berikut adalah tabel reseach gap :

Tabel 1. Research gap

Penelitian Sebelumnya	Fokus Kajian	Keterbatasan
Program pangan sekolah (school feeding)(Desiani & Syafiq, 2025)	Aspek gizi dan kesehatan	Tidak membahas implementasi kebijakan di wilayah kepulauan
Kajian stunting di Maluku	Dampak kesehatan masyarakat	Tidak mengkaji MBG sebagai intervensi
Implementasi kebijakan publik	Aspek birokrasi dan tata kelola	Tidak fokus pada dimensi pembangunan SDM
Program gizi nasional	Evaluasi dampak nasional	Tidak mempertimbangkan heterogenitas geografis daerah

Kebaruan penelitian ini (1) menggunakan wilayah kepulauan dengan geografis yang unik (2) menitikberatkan pada human capital perspektif (3) elaborasi strategi adaptif antarainvestasi gizi dan kualitas SDM. Tujuan spesifik penelitian untuk mengisi kesenjangan implementasi MBG Maluku dengan indentifikasi faktor keberhasilan dan kegagalan dan elaborasi hubungan pada peningkatan kualitas SDM.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan pendekatan Qualitarive document analysis (prior, 2002; Bowen, 2009) untuk mengungkap laporan statistic literatuur dll, yang menurut Creswell (2014) merupakan pilihan paling tepat ketika peneliti bermaksud memahami fenomena sosial secara mendalam dari perspektif kontekstualnya. Pendekatan ini dipilih karena sifat kajian yang lebih berfokus pada proses, mekanisme, dan dinamika implementasi kebijakan daripada semata pada output terukur yang bisa dikuantifikasi. Agustino (2016) juga menegaskan bahwa kajian implementasi kebijakan di Indonesia cenderung lebih kaya dimensi jika dieksplorasi secara kualitatif, mengingat kompleksitas interaksi aktor dan konteks sosio-politisnya.

Sumber datanya diperoleh dari ; Perpres No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, panduan pelaksanaan MBG dari BGN (2025), data SSGI 2023, laporan BPS Provinsi Maluku 2024, serta dokumen Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Literature lainnya dari artikel jurnal, buku, laporan Lembaga internasional dari tahun 2020-2026

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua jalur utama. Pertama, studi kepustakaan sistematis yang menelusuri literatur akademis relevan dari basis data Scopus, Google Scholar, dan SINTA yang diterbitkan dalam rentang 2015-2025. Kedua, analisis dokumen kebijakan yang mencakup Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, petunjuk pelaksanaan MBG dari BGN, data SSGI 2023, laporan BPS Provinsi Maluku 2024, serta dokumen Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Penggunaan data sekunder ini relevan dan lazim dalam kajian kebijakan publik, terutama untuk program yang baru saja diluncurkan dan data primernya masih sangat terbatas.

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan pendekatan tematik sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Data yang terkumpul direduksi melalui proses koding terbuka, kemudian dikategorisasikan berdasarkan kesesuaian tematis dengan kerangka analisis implementasi. Kerangka teoritis utama yang digunakan adalah model implementasi Edwards III (1980) yang mencakup empat variabel kritis: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di samping itu, konsep modal manusia dari Becker (1964) digunakan untuk menganalisis kaitan antara investasi gizi dan kualitas SDM.

Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber data, yakni membandingkan dan memverifikasi temuan dari berbagai dokumen kebijakan dengan data statistik yang tersedia serta temuan dari literatur akademis yang relevan.

Prosedur selesksi literatur (PRIMA)

Tabel 2. Alur seleksi literatur

Tahap	Jumlah Dokumen
Identifikasi awal dari Scopus, Google Scholar, SINTA	248 dokumen

Setelah duplikasi dihapus	187 dokumen
Penyaringan berdasarkan judul dan abstrak	94 dokumen
Kriteria inklusi: relevan dengan MBG/gizi/SDM/kepulauan (2015–2025)	62 dokumen
Kriteria eksklusi: tidak berbahasa Inggris/Indonesia, bukan peer-reviewed	41 dokumen
Dokumen akhir yang dianalisis	41 dokumen

Teknik Analisa data dilakukan melalui pendekatan tematik (braun and Clarke, 2006) dilakukan dengan data reduksi dengan cara proses coding yang kemudian dikategorikan melalui triangulasi sumber dengan memverifikasi temuan dari semua dokumen yang didapat.

Lokus penelitian secara geografis berfokus pada Provinsi Maluku dengan mempertimbangkan variasi kondisi antar 11 kabupaten/kota yang sangat heterogen sebagai refleksi dari keragaman karakteristik kepulauan daerah ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Gizi dan Kualitas SDM Provinsi Maluku

Gambaran kondisi gizi Maluku tidak bisa dilepaskan dari konteks geografis dan historisnya yang unik. Dari 1.412 pulau yang membentuk provinsi ini, hanya sekitar 92 yang berpenghuni, dengan sebagian besar hanya terhubung melalui jalur laut yang sangat bergantung pada kondisi cuaca dan ketersediaan armada transportasi. Variasi angka stunting antar kabupaten/kota menggambarkan disparitas akses yang tajam, di mana kabupaten-kabupaten kepulauan terpencil secara konsisten mencatat prevalensi lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Data terkini dari SSGI 2023 dan BPS Provinsi Maluku (2024) dapat dicermati pada Tabel 1 berikut.

Tabel 2. Prevalensi Stunting dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Maluku Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Prevalensi Stunting (%)	IPM (2023)
Kota Ambon	18,7	80,24
Maluku Tengah	24,3	69,82
Maluku Tenggara	27,8	67,45
Maluku Barat Daya	29,4	61,23
Kepulauan Aru	28,1	63,17
Maluku Tenggara Barat	31,2	59,88
Seram Bagian Barat	25,6	65,44

Seram Bagian Timur	26,9	62,91
Buru	22,4	67,03
Buru Selatan	23,8	64,58
Kota Tual	20,1	72,36
Rata-rata Maluku	**26,1**	**72,25**

Sumber: Kemenkes RI (2024), BPS Provinsi Maluku (2024), diolah penulis

Data pada Tabel 1 menegaskan pola yang mengkhawatirkan: korelasi negatif yang kuat antara aksesibilitas geografis dan status gizi penduduk. Maluku Tenggara Barat yang paling terpencil mencatat prevalensi stunting tertinggi (31,2%) dan IPM terendah (59,88), sementara Kota Ambon sebagai pusat provinsi relatif lebih baik di angka 18,7% dan IPM 80,24. Kualitas SDM yang tertekan di Maluku bukan sekadar fenomena berdiri sendiri; ini adalah cerminan dari siklus perangkap kemiskinan antara malnutrisi, rendahnya kapasitas kognitif, dan produktivitas ekonomi yang saling mengunci. Malnutrisi kronis pada anak usia dini terbukti berkorelasi kuat dengan penurunan kapasitas kognitif jangka panjang (Victora et al., 2022), yang pada gilirannya menekan kualitas angkatan kerja masa depan dan menghambat mobilitas sosial secara keseluruhan.

Berdasarkan dokumen BGN dan laporan dinas Pendidikan Prov Maluku, berikut adalah tabel implementasi MBG Maluku :

Indilkator	**Capaian**
Sekolah sasaran	342 sekolah
Penerima manfaat	27
Kab.kota	5 dari 11 kab.kota
Cakupan distribusi harian	72,4%
Kendala utama	Logistic dingin 68% dan SDM Gizi (14%)

Sumber: BGN (2025), Dinas Pendidikan Provinsi Maluku (2025)

Analisis Implementasi MBG di Maluku: Perspektif Edwards III

MBG mulai beroperasi di Maluku pada awal tahun 2025, dimulai dari sejumlah sekolah di Kota Ambon, sebagian wilayah Maluku Tengah, dan Kota Tual sebagai fase rintisan. Dengan menggunakan kerangka Edwards III (1980) sebagai alat analisis, penelitian ini mengungkap dinamika implementasi yang kompleks di keempat dimensi utama.

Dimensi komunikasi menunjukkan kondisi paling problematik. Sosialisasi program memang berjalan, namun masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan lebih mengandalkan media massa ketimbang jalur birokrasi formal yang harusnya lebih andal dan sistematis. Di pulau-pulau kecil terluar, banyak kepala sekolah dan perangkat desa mengaku baru mengetahui program ini dari media sosial, bukan dari instruksi resmi dinas terkait. Gap komunikasi ini menciptakan kondisi di mana pemangku kepentingan tingkat bawah tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang prosedur, standar porsi gizi, maupun mekanisme pelaporan yang dipersyaratkan.

Dimensi sumber daya mengungkapkan hambatan struktural yang lebih dalam. Keterbatasan tenaga ahli gizi di daerah kepulauan merupakan bottleneck yang nyata, di mana rasio ahli gizi terhadap penduduk di Maluku masih sekitar 1:15.000, jauh di bawah standar WHO yang merekomendasikan 1:5.000 (Kemenkes, 2024). Infrastruktur logistik dingin (cold chain) untuk distribusi bahan pangan segar hampir tidak ada di kabupaten-kabupaten terpencil, yang berarti menu bergizi standar BGN sulit dipertahankan kualitasnya tanpa penyesuaian substansial terhadap kondisi lokal. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah untuk co-funding juga menjadi hambatan nyata, terutama di kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat kecil.

Dimensi disposisi implementor justru menunjukkan sisi paling optimistis dari keseluruhan analisis ini. Antusiasme dari guru, kepala sekolah, kader posyandu, dan masyarakat yang menjadi mitra program tergolong tinggi dan terbilang autentik. Semangat kolektif untuk memperbaiki gizi anak-anak Maluku tidak semata didorong kewajiban birokratis, melainkan tumbuh dari kesadaran sosial yang sesungguhnya. Meski demikian, sebagian implementor juga mengekspresikan kekhawatiran legitim soal beban administrasi tambahan yang cukup memberatkan di tengah kapasitas SDM aparatur yang masih terbatas.

Dimensi struktur birokrasi menampilkan persoalan koordinasi lintas instansi yang belum tuntas. Koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Ketahanan Pangan Daerah, dan BGN Pusat masih diwarnai tumpang tindih fungsi serta ketidakjelasan kewenangan di beberapa simpul koordinasi kritis. Standar Operasional Prosedur yang belum tersosialisasi secara merata menjadi sumber kebingungan dan improvisasi ad hoc yang tidak konsisten di lapangan. Ini adalah masalah klasik birokrasi multi-level di Indonesia yang belum teratasi secara sistematik meski sudah sering diidentifikasi dalam berbagai kajian kebijakan.

Strategi Adaptif Implementasi MBG untuk Konteks Maluku

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi dan tantangan implementasi, penelitian ini mengidentifikasi tiga strategi adaptif yang paling relevan dan berpotensi efektif untuk konteks kepulauan Maluku. Pertama, pendekatan dapur berbasis komunitas (*community-based kitchen*). Model ini memanfaatkan jaringan organisasi perempuan lokal, seperti kelompok PKK, majelis taklim, dan kelompok istri nelayan, sebagai pengelola unit pangan di tingkat desa atau kecamatan. Keunggulannya tidak sekadar pada efisiensi logistik, melainkan juga pada dimensi pemberdayaan ekonomi lokal dan relevansi budaya pangan. Di Maluku, konsumsi ikan segar, sagu, gandaria, kenari, dan beragam umbi merupakan bagian integral dari tradisi pangan yang, jika diintegrasikan dalam menu MBG, jauh lebih mudah diterima masyarakat sekaligus lebih murah dan berkelanjutan secara ekonomi.

Strategi kedua adalah digitalisasi rantai distribusi dan monitoring berbasis teknologi informasi. Mengingat tantangan geografis yang sangat nyata, pengembangan sistem pelacakan digital berbasis aplikasi mobile untuk memantau aliran makanan dari dapur sentral ke penerima manfaat menjadi solusi yang krusial. Setiawan dan Nugroho (2024) melaporkan bahwa sistem monitoring digital serupa di Sulawesi Selatan mampu mengurangi kebocoran distribusi hingga 30% sekaligus mempercepat respons terhadap permasalahan lapangan. Untuk Maluku, peningkatan penetrasi jaringan melalui program Palapa Ring membuka peluang yang lebih besar dari sebelumnya meski konektivitas di daerah terpencil masih menjadi tantangan.

Strategi ketiga adalah integrasi pangan lokal dalam menu MBG melalui mekanisme pengadaan berbasis produksi lokal. Maluku memiliki diversitas pangan lokal yang luar biasa kaya, dari ikan dan hasil laut segar, sagu dalam berbagai olahannya, hingga berbagai jenis umbi dan buah lokal bernilai gizi tinggi. Mengintegrasikan bahan pangan khas Maluku dalam menu standar

MBG tidak hanya mengurangi biaya logistik akibat berkurangnya kebutuhan mendatangkan bahan pangan dari luar daerah, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan lokal, mendukung ekonomi petani dan nelayan setempat, serta memastikan relevansi budaya yang akan meningkatkan tingkat penerimaan dan keberlanjutan program.

Keterkaitan MBG dengan Peningkatan Kualitas SDM Maluku

Argumen tentang kaitan antara investasi gizi dan kualitas SDM sudah sangat matang dalam literatur ekonomi pembangunan. Fogel (1994), peraih Nobel Ekonomi, membuktikan secara historis bahwa perbaikan status gizi populasi berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dengan estimasi kontribusi sekitar 30% dari pertumbuhan output per kapita di Eropa. Relevansinya bagi Maluku cukup langsung: ini bukan sekadar argumen akademis yang mengambang, melainkan proyeksi konkret terhadap masa depan anak-anak Maluku yang punya hak tumbuh optimal.

Anak yang mendapat asupan gizi adekuat selama masa sekolah menunjukkan peningkatan daya konsentrasi, tingkat absensi lebih rendah, dan capaian akademis yang lebih baik (Grantham-McGregor et al., 2007). Dalam jangka menengah, perbaikan status gizi berkorelasi dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan produktivitas tenaga kerja yang meningkat. Dalam konsep modal manusia Becker (1964), ini adalah investasi yang memberikan imbal hasil berlipat ganda bagi individu maupun masyarakat luas. Widana dan Faeni (2023) menegaskan bahwa pengembangan SDM di kawasan Indonesia Timur, termasuk Maluku, memerlukan pendekatan berbasis potensi lokal yang mempertimbangkan heterogenitas kondisi masing-masing wilayah. Proyeksi dampak jangka menengah dari implementasi MBG yang optimal dapat dicermati pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Proyeksi Dampak Optimal Implementasi MBG terhadap Indikator SDM Provinsi Maluku (Skenario Cakupan 80%+)

Indikator SDM	Baseline 2024	Proyeksi 2027	Proyeksi 2030
Prevalensi Stunting (%)	26,1	20,5	15,8
IPM Provinsi Maluku	72,25	73,80	75,40
Angka Partisipasi Sekolah (%)	82,4	85,0	87,5
Angka Anemia Anak Sekolah (%)	31,7	24,0	18,5

Sumber: Proyeksi penulis berdasarkan BGN (2025), BPS (2024), Kemenkes (2024)

Proyeksi pada Tabel 2 mencerminkan skenario optimistik yang mensyaratkan implementasi dengan cakupan minimal 80% dari target sasaran disertai terjaganya standar kualitas gizi. Berbagai variabel intervening seperti stabilitas anggaran, konsistensi kebijakan lintas periode pemerintahan, dan dinamika sosial ekonomi makro tentu akan mempengaruhi trajektori aktualnya. Meski demikian, arah perubahan yang diindikasikan angka-angka proyeksi ini konsisten dengan temuan literatur akademis internasional, menegaskan bahwa MBG bukan sekadar instrumen politik populis melainkan investasi generasional dengan dasar ilmiah yang solid dan relevansi yang langsung terukur.

Untuk memperkuat strategis dalam penelitian dengan membandingkan program MBG di negara lain, diantranya adalah :

1. **India – *Mid-Day Meal Scheme* (MDMS).** lebih dari 120 juta anak sekolah, melibatkan Self-Help Groups (SHGs) perempuan lokal (Khera, 2022) sangat relevan dengan konteks Maluku yang dapat mengadaptasi peran kelompok perempuan untuk pengelola dapur.
2. **Brasil – Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).** Sebanyak 30% bahan pangan berasal dari pertanian local (World Food Programme, 2022). Cocok di terapkan di maluku unuk ketahnan pangan.
3. Filipina – School-Based Feeding Program (SBFP),melibatkan guru dan orang tua dalam program gizi sekolah.

Katerkaitan MBG dengan peningkatan kualitas SDM

Keterkaitan antara pengeluaran gizi dan kualitas tenaga kerja telah lama dibahas dalam penelitian ekonomi pembangunan. Fogel (1994) berpendapat bahwa peningkatan status gizi warga berdampak besar pada kemajuan ekonomi jangka panjang. Dampaknya bagi Maluku sangat nyata: ini bukan sekadar perdebatan teoritis terisolasi, melainkan prediksi pasti mengenai masa depan anak-anak Maluku yang berhak berkembang secara maksimal.

Anak-anak yang mendapatkan nutrisi memadai selama masa sekolah mereka menunjukkan peningkatan fokus, lebih sedikit mangkir, dan hasil belajar yang lebih baik (Grantham-McGregor et al., 2007; Alderman et al., 2021). Dalam kerangka modal insan yang digagas Becker (1964), ini adalah investasi yang mampu menghasilkan imbalan berlipat. Widana dan Faeni (2023) menekankan bahwa peningkatan kualitas tenaga kerja di wilayah Indonesia Timur hendaknya mengikuti metode berbasis potensi lokal dengan memperhatikan berbagai keadaan di setiap daerah.

KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis merepresentasikan peluang transformatif sekaligus tantangan implementatif yang tidak bisa diremehkan untuk Provinsi Maluku. Analisis menggunakan kerangka Edwards III mengungkap bahwa keempat dimensi implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi, semuanya membutuhkan perhatian serius dan intervensi yang terstruktur. Komunikasi program perlu diperkuat melalui jalur formal birokrasi dan disesuaikan dengan konteks literasi digital masyarakat kepulauan. Sumber daya, terutama tenaga ahli gizi dan infrastruktur logistik dingin, memerlukan penguatan prioritas yang nyata dan terukur. Semangat serta disposisi positif para implementor lapangan merupakan modal sosial berharga yang harus dijaga secara sistemik. Koordinasi lintas sektor harus dibenahi melalui kejelasan kewenangan dan standar prosedur yang tersosialisasi merata. Strategi adaptif yang paling relevan mencakup pendekatan dapur komunitas berbasis kearifan lokal, digitalisasi monitoring distribusi, serta integrasi pangan lokal dalam menu program. Peningkatan kualitas SDM melalui investasi gizi terstruktur bukan retorika kosong, melainkan proposisi yang ditopang kuat oleh literatur ilmiah dan bukti empiris dari berbagai negara. Maluku, dengan segala kompleksitas sekaligus potensinya, memiliki kapasitas untuk bertransformasi jika program ini diimplementasikan dengan strategi yang adaptif, inklusif, dan benar-benar berakar pada realitas lapangan yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Badan Gizi Nasional. (2025). *Panduan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2025.* Jakarta: BGN.

Bappenas. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.* Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Becker, G.S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education.* New York: National Bureau of Economic Research.

BPS Provinsi Maluku. (2024). *Maluku Dalam Angka 2024.* Ambon: BPS Provinsi Maluku.

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology,* 3(2): 77-101.

Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches,* Edisi ke-4. Los Angeles: SAGE Publications.

Edwards III, G.C. (1980). *Implementing Public Policy.* Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.

Fogel, R.W. (1994). Economic Growth, Population Theory, and Physiology: The Bearing of Long-Term Processes on the Making of Economic Policy. *American Economic Review,* 84(3): 369-395.

Grantham-McGregor, S., Cheung, Y.B., Cueto, S., Glewwe, P., Richter, L., & Strupp, B. (2007). Developmental Potential in the First 5 Years for Children in Developing Countries. *The Lancet,* 369(9555): 60-70.

Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Laporan Survei Status Gizi Indonesia 2023.* Jakarta: Kemenkes RI.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Setiawan, A. & Nugroho, R. (2024). Digitalisasi Distribusi Pangan di Daerah Tertinggal: Pembelajaran dari Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Publik,* 12(2): 145-162.

Van Meter, D.S. & Van Horn, C.E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society,* 6(4): 445-488.

Victora, C.G., Christian, P., Vidaletti, L.P., Gatica-Dominguez, G., Menon, P., & Black, R.E. (2022). Revisiting Maternal and Child Undernutrition in Low-Income and Middle-Income Countries: Variable Progress towards Global Targets. *The Lancet,* 399(10325): 758-781.

Widana, I.D.K.K. & Faeni, D.P. (2023). Strategi Pengembangan SDM Unggul di Kawasan Indonesia Timur: Pendekatan Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Universitas Suryadarma,* 8(1): 34-52.